



# Ada Oknum Miliki Banyak Lapak Jualan

## ■ Pansus Minta Pemkot Tindak Lanjuti Temuan Polemik di Teras Malioboro

**YOGYA, TRIBUN** - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro DPRD Kota Yogyakarta menemukan sejumlah polemik dan pelanggaran. Salah satunya adalah temuan kepemilikan lapak ganda oleh oknum yang sehari-harinya beraktivitas di Teras Malioboro 1 dan 2.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun secara tegas diminta untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan yang disampaikan legislatif tersebut. Seandainya ke depan tidak ada upaya nyata, maka Pansus merekomendasikan semua pedagang kembali berjualan di pedestrian.

Ketua Pansus Pengawasan Relokasi PKL Kawasan Malioboro, Fokki Ardhyanto, menjelaskan, dalam proses yang digelar oleh jajaran. Pansus menemukan indikasi seorang oknum yang punya beberapa lapak sekaligus. Hal itu, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan dewan.

"Kami menemukan fenomena itu, diduga ada satu orang memiliki beberapa lapak, baik di Teras Malioboro 1 dan 2. Diduga, itu dari oknum pengurus paguyuban, mereka bisa memiliki lapak lebih dari satu. Itu aduannya berasal dari teman-teman pedagang," urainya, Senin (18/7).

Pansus pun mendesak Pemkot Yogyakarta, supaya menindaklanjuti temuan tersebut. Dengan harapan, aturan pembagian lapak yang sudah disusun sejak jauh-jauh hari sebelum relokasi, bisa diterapkan secara fair, jangan sampai timbul permasalahan semacam ini.

"Pansus merekomenda-

sikan pemerintah melaksanakan penyelidikan, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak terlibat, selaras perundang-undangan," tegasnya.

Tidak berhenti sampai di situ, Pansus beranggotakan 12 legislator dari beragam fraksi tersebut juga menemukan adanya dugaan pedagang yang tidak memanfaatkan jatah lapaknya dengan baik. Menurut Fokki, berdasarkan hasil investigasi, yang bersangkutan tak pernah jualan.

Fenomena tersebut jelas menjadi teka-teki, lantaran tidak sembarang pedagang yang bisa mendapatkan jatah lapak di Teras Malioboro 1 dan 2. Dia menyebut hanya yang terdaftar secara resmi di paguyuban PKL saja yang difasilitasi oleh Pemkot, atau Pemda DIY di kedua tempat relokasi itu.

"Bagi pemilik lapak di Teras Malioboro, yang tidak membuka usahanya secara rutin, kami merekomendasikan pada pemerintah, untuk mengambilnya kembali, agar dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal," ujar Fokki.

Pihaknya juga menyelidiki oknum yang melakukan pungutan liar, dan merugikan PKL Malioboro. "Selidiki, pemerintah harus mengambil tindakan tegas, kasih sanksi sesuai ketentuan hukum," imbuhnya.

Di samping itu, Pansus juga memberikan catatan dari hasil pembahasan relokasi PKL Malioboro. Salah satu yang paling menonjol ialah keluhan pedagang, yang menilai sirkulasi pengunjung di Teras Malioboro 2 tidak merata, sehingga ada lapak yang jarang sekali tersentuh.

"Kalau catatan dan re-

### TELUSURI KEJANGGALAN

- Pansus pengawasan relokasi PKL temukan polemik dan pelanggaran.
- Ada oknum yang miliki banyak lapak di Teras Malioboro 1 dan 2.
- Ada dugaan pungutan liar oleh oknum di kawasan premium tersebut.
- Pemkot diminta tindak tegas oknum yang merugikan PKL.

komendasi tidak ditindaklanjuti serius dan diimplementasikan, maka Pansus merekomendasikan PKL dan tenant yang telah direlokasi ke Teras Malioboro, dikembalikan ke pedestrian," pungkasnya.

### Evaluasi kebijakan

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengungkapkan, bahwa pihaknya siap melakukan tindak lanjut, terhadap catatan serta rekomendasi Pansus. Ia menyatakan, pandangan tersebut menjadi bahan berharga, untuk mengevaluasi kebijakan relokasi ini.

"Ya, kami berterimakasih kepada Pansus, itu menjadi bahan bagi Pemkot untuk evaluasi. Catatan serta rekomendasi yang disampaikan Pansus, terkait kebijakan relokasi PKL, tentu akan ditindaklanjuti," urainya.

Di antara deretan poin yang dijabarkan para wakil rakyat, Sumadi fokus pada keluhan pelaku ekonomi di Teras Malioboro, soal belum maksimalnya omzet yang didapat. Menurutnya, PKL harus bersabar mengingat situasi pandemi Covid-19 yang baru saja menunjukkan gelagat perbaikan. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005